



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
2020–2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya daya saing daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020–2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 2020–2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Dihapus.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2024 sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif;
  - b. pendahuluan;
  - c. gambaran birokrasi instansi Pemerintah Daerah;
  - d. agenda reformasi birokrasi instansi Pemerintah Daerah;
  - e. mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - f. penutup.
3. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIIA

#### PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3B

Pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:

- a. pelaksanaan reformasi birokrasi general; dan
- b. pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.

### Pasal 3C

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B huruf a terdiri dari 21 (dua puluh satu) kegiatan utama yang bersumber dari mandat reformasi birokrasi nasional meliputi:

- a. penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*);
- b. pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
- d. pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan pelayanan publik digital;
- f. pembangunan zona integritas di unit kerja;
- g. penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. penguatan upaya pencegahan korupsi;
- j. pelaksanaan tata kelola kebijakan publik;
- k. pelaksanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- l. pelaksanaan arsip digital;
- m. pelaksanaan data statistik sektoral;
- n. penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- o. penguatan pengelolaan keuangan dan aset;
- p. penataan jabatan fungsional;
- q. penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara;
- r. pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara;
- s. penguatan sistem merit;
- t. pelaksanaan *core value* aparatur sipil negara; dan
- u. pelaksanaan pelayanan publik prima.

### Pasal 3D

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B huruf b terdiri dari 5 (lima) tema meliputi:

- a. penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi pemerintahan;
- d. peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- e. pengendalian inflasi.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk:
    - a. tim reformasi birokrasi general; dan
    - b. tim reformasi birokrasi tematik.
  - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Desember 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd  
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin S.H., M.H.  
Nip. 19810716 200803 1001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH 2020–2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mencapai Predikat “B” dengan kategori “BAIK” dengan capaian nilai sebesar 66,81. Dari capaian tersebut, tentunya masih perlu upaya peningkatan, karena kalau kita lihat masih ada beberapa komponen dalam penilaian yang terlihat fluktuatif. Inilah yang perlu juga menjadi pencermatan kita untuk selalu melakukan perbaikan.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng tahun pelaksanaan 2023-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Kondisi ini baru bisa kita wujudkan bila dalam penyusunan dokumen perencanaan sinergis dan selaras dengan dokumen perencanaan tingkat atasnya. Sinergitas dalam perencanaan ini seperti terlihat dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan agenda prioritas nasional dengan 2 (dua) isu strategis yaitu isu strategis tingkat hulu dan isu strategis tingkat hilir.

Pelaksanaan isu strategis di tingkat hulu dituangkan dalam rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General. Ditingkat hilir pelaksanaannya dipertajam bersamaan dengan pelaksanaan rencana aksi dengan isu strategis Reformasi Birokrasi Tematik Tahun pelaksanaan 2023-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik merupakan mandatory dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama, 26 (dua puluh enam) indikator serta 5 (lima) tema RB tematik.

Semoga Road Map Reformasi Birokrasi ini, dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng 2020-2024 adalah dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi. Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, sebagai upaya menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng, diperlukan suatu instrumen kebijakan, yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi, guna menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan percepatan pencapaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir Tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, seperti pelayanan publik dan pengurangan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Terkait hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng dengan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng Tahun Pelaksanaan 2023-2024 dalam penyusunnya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcomes) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan Bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
6. Selaras, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi dan diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun secara terintegrasi antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng dengan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta terpadu dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

#### 2.1 Capaian Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

##### 1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mencapai Predikat “B” kategori “BAIK” dengan capaian nilai sebesar 66,81. Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu Tahun 2018-2022 terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1  
 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi  
 Pemerintah Kabupaten Buleleng  
 2018-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	TAHUN ANGGARAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Komponen Pengungkit						
I.	Pemenuhan	20	13,69	13,79	10,6	10,78	11,75
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10	2,7	2,73	4,66	5,40	7,05
III.	Reform	30	10,07	10,2	13,76	15,27	15,82
Total Komponen Pengungkit		60	26,46	26,72	29,02	31,45	34,62
B.	Komponen Hasil						
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,025	7,185	7,83	7,82	7,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,38	8,40	9,00	8,36	9,56
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,88	9,07	9,58	8,13	8,74
4.	Kinerja Organisasi	10	7,025	7,185	5,15	6,45	6,08
Total Komponen Hasil		40	31,31	31,84	31,56	30,76	32,19
Indeks RB (Pengungkit + Hasil)		100,00	57,77	58,56	60,58	62,21	66,81
Tingkat/Predikat RB			C	CC	B	B	B

*Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022*

## 2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Isu Strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua Isu Strategis yaitu :

### a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu Strategis Tingkat Hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu Strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa Isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang Belum Kolaboratif;
2. Transformasi Digital yang Belum Optimal;
3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas;
4. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala; dan
5. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

### b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu Strategis tingkat hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik, merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tema penanggulangan kemiskinan;
2. Pelaksanaan tema peningkatan investasi;
3. Pelaksanaan tema digitalisasi pemerintahan;
4. Pelaksanaan tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN); dan
5. Pelaksanaan tema pengendalian inflasi.

## 2.2 Harapan Pemangku Kepentingan

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi, baik Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunan. Keterpaduan ini diupayakan dengan membenahan pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pembenahan dimaksud nantinya mampu menuntaskan isu-isu strategis dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



**BAB III**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**3.1 Penetapan Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng**

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan, sasaran, kegiatan utama dan indikatornya tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
 Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi  
 General Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator
1	2	3	4
Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi/ Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile)	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi
		Pelaksanaan Sistem kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
		Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator
1	2	3	4
		Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nilai SAKIP
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP
		Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
		Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
		Penguatan upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan	Indeks Reformasi Hukum

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator
1	2	3	4
		Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	OPINI BPK Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
		Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta
		Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN
		Penguatan Sistem Merit	Indeks sistem Merit
		Pelaksanaan Core Value ASN	Indeks BerAKHLAK
			Employeer Branding
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Indeks Pelayanan Publik		

Sumber : Road Map RB Nasional

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Tema Reformasi Birokrasi Tematik  
Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Tema
1	2	3
Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Terwujudnya Penyelesaian isu tematik	Penanggulangan Kemiskinan
		Peningkatan Investasi
		Digitalisasi Pemerintahan
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
		Pengendalian Inflasi

Sumber : Road Map RB Nasional

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik  
 3.2.1 Reformasi Birokrasi General

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL  
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
 TAHUN 2023-2024

STEP 1

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (mendesak)	Biaya Rendah	Skala Prioritas (Total Skor)	Koordinator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SASARAN STRATEGIS 1 : TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF, DAN AKUNTABEL									
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi/ Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile)	1	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	10	2	5	10	27	BKPSDM, BAGIAN ORGANISASI SETDA
2	Pelaksanaan Sistem kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	2	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	10	8	10	10	38	BKPSDM, BAGIAN ORGANISASI SETDA
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	3	Indeks SPBE	10	5	10	4	29	DISKOMINFOSANTI
		4	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	10	5	10	4	29	DISKOMINFOSANTI

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023-2024

STEP 1

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (mendesak)	Biaya Rendah	Skala Prioritas (Total Skor)	Koordinator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	5	Indeks Perencanaan Pembangunan	10	7	9	7	33	BAPPEDA
		6	Nilai SAKIP	10	6	10	5	31	ITDA, BAPPEDA, BAGIAN ORGANISASI SETDA
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	7	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	10	3	9	10	32	DPMPTSP
6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	8	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	10	6	8	8	32	ITDA
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	9	Tingkat Maturitas SPIP	10	5	7	8	30	ITDA
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	10	2	9	5	26	ITDA
9	Penguatan upaya Pencegahan Korupsi	11	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	4	9	6	29	ITDA
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	12	Indeks Kualitas Kebijakan	10	7	10	7	34	BAGIAN HUKUM SETDA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	13	Indeks Reformasi Hukum	10	5	10	5	30	BAGIAN HUKUM SETDA

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023-2024

STEP 1

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (mendesak)	Biaya Rendah	Skala Prioritas (Total Skor)	Koordinator
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Pelaksanaan Arsip Digital	14 Tingkat Digitalisasi Arsip	10	5	5	6	26	DAPD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	15 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	10	6	10	8	34	DISKOMINFOSANTI
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	16 Indeks Tata Kelola Pengadaan	10	4	10	7	31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	17 OPINI BPK	10	5	5	5	25	BPKPD
		18 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	10	5	8	5	28	ITDA
SASARAN STRATEGIS 2 : BUDAYA BIROKRASI BerAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL								
1	Penataan Jabatan Fungsional	1 Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	10	10	10	10	40	BKPSDM
2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	2 Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	10	6	5	6	27	BKPSDM
3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	3 Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	10	8	10	10	38	BKPSDM
4	Penguatan Sistem Merit	4 Indeks sistem Merit	10	8	6	10	34	BKPSDM

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023-2024

STEP 1

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (mendesak)	Biaya Rendah	Skala Prioritas (Total Skor)	Koordinator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Pelaksanaan Core Value ASN	5	Indeks BerAKHLAK	10	6	10	2	28	BAGIAN ORGANISASI SETDA
		6	Employeer Branding	10	5	10	2	27	BAGIAN ORGANISASI SETDA
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	7	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	10	5	10	5	30	BAGIAN ORGANISASI SETDA
		8	Indeks Pelayanan Publik	10	3	10	2	25	BAGIAN ORGANISASI SETDA



PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 2

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Satuan	Baseline 2022			Target Tahunan		Instansi		
				Target	Realisasi	Capaian	2023	2024	Koordinator	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SASARAN STRATEGIS 1 : TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF, DAN AKUNTABEL											
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi/ Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile)	1	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	%	100	100	100	100	100	BKPSDM, BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	2	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	%	-	-	-	100	100	BKPSDM, BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	3	Indeks SPBE	Angka	3,03	3,03	100	3,1	3,2	DISKOMINFOSANTI	SELURUH UNIT KERJA
		4	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	%	30	30	100	40	50	DISKOMINFO SANTI	SELURUH UNIT KERJA
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	5	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	100	94	94	100	100	BAPPEDA	SELURUH UNIT KERJA
		6	Nilai SAKIP	Angka	70	68,33	97,61	70,01	70	ITDA, BAPPEDA, BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	7	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	%	100	100	100	100	100	DPMPSTP	SELURUH UNIT KERJA

PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 2

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Satuan	Baseline 2022			Target Tahunan		Instansi	
				Target	Realisasi	Capaian	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	8 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	%	25	0	0	25	25	ITDA	SELURUH UNIT KERJA
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	9 Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	2,819	94	3	3	ITDA	SELURUH UNIT KERJA
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	%	100	100	100	100	100	ITDA	SELURUH UNIT KERJA
9	Penguatan upaya Pencegahan Korupsi	11 Survei Penilaian Integritas (SPI)	Angka	79	78,76	99,70	79	79	ITDA	ITDA
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	12 Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	-	-	-	50	60	BAGIAN HUKUM SETDA	SELURUH UNIT KERJA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	13 Indeks Reformasi Hukum	Angka	85,4	92,2	107,96	86	88	BAGIAN HUKUM SETDA	SELURUH UNIT KERJA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	14 Tingkat Digitalisasi Arsip	%	8	8	100	25	60	DAPD	SELURUH UNIT KERJA
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	15 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	80	80	100	85	90	DISKOMINFOSANTI	SELURUH UNIT KERJA

PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 2

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Satuan	Baseline 2022			Target Tahunan		Instansi	
				Target	Realisasi	Capaian	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	16 Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	75	78,1	104,13	80	85	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA	SELURUH UNIT KERJA
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	17 OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD	SELURUH UNIT KERJA
		18 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	%	100	100	100	100	100	ITDA	SELURUH UNIT KERJA
SASARAN STRATEGIS 2 : BUDAYA BIROKRASI BerAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL										
1	Penataan Jabatan Fungsional	1 Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	%	100	100	100	100	100	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA
2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	2 Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	%	100	100	100	100	100	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA
3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	3 Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	%	100	100	100	100	100	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA
4	Penguatan Sistem Merit	4 Indeks sistem Merit	Angka	325	330	101,54	325	330	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA

PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 2

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan		Satuan	Baseline 2022			Target Tahunan		Instansi	
					Target	Realisasi	Capaian	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pelaksanaan Core Value ASN	5	Indeks BerAKHLAK	Angka	63	77	122,22	63	64	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
		6	Employeer Branding	Angka	-	-	-	-	-	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	7	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	85	85,2	100,24	85	85	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
		8	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,3	4,3	100,00	4,3	4,3	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA

RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 3

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Satuan	Target Tahunan		Aksi	Output		Tahun 2023								Tahun 2024								Instansi		
				2023	2024		Satuan	Indikator	Target Penyelesaian				Target Anggaran				Target Penyelesaian				Target Anggaran				Koordinator	Pelaksana	
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
SASARAN STRATEGIS 1 : TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF, DAN AKUNTABEL																											
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi/ Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile)	1	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	%	100	100	Penyusunan PERBUP SOTK Badan (BRIDA)	Dokumen	Jumlah PERBUP SOTK	1	-	-	-	65.978.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM, BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
							Pelaksanaan evaluasi kelembagaan berdasarkan PERMENDAGRI 99/2018 dan PERMENPAN RB 20/2018	Laporan	Jumlah laporan evaluasi kelembagaan	-	2	-	-	-	84.695.921	-	-	-	2	-	-	-	-	154.310.812			
							Penyusunan kajian penataan kelembagaan	Dokumen	Jumlah dokumen kajian kelembagaan	-	-	-	1	-	-	-	70.325.317	-	-	-	-	-	-	-			
2	Pelaksanaan Sistem kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	2	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	%	100	100	Penyusunan PERBUP sistem Kerja	Dokumen	Jumlah PERBUP sistem kerja	1	-	-	-	65.978.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM, BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA	
							Pelaksanaan monev sistem kerja baru	Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (monev) sistem kerja baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	151.689.188	-	-	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	3	Indeks SPBE	Angka	3,1	3,2	Penguatan pencapaian target arsitektur dan peta rencana SPBE	Rekomen dasi	Jumlah rekomendasi SPBE	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	DISKOMINFOS ANTI	SELURUH UNIT KERJA	
		4	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	%	40	50	Peningkatan layanan SPBE di 4 sektor	MoU	Jumlah MoU SPBE	1	1	1	1	35.898.666	12.716.691	12.716.691	12.703.710	1	1	1	1	18.091.352	18.091.352	18.091.352	18.091.352	DISKOMINFO SANTI	SELURUH UNIT KERJA
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	5	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	100	100	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang renstranya selaras dengan RPD	-	40	40	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	BAPPEDA	SELURUH UNIT KERJA	
								Laporan	Jumlah rekapitulasi anggaran Perangkat Daerah yang difocusing untuk mendukung kinerja utama organisasi	-	-	-	1	165.964.980	148.068.028	132.712.826	119.590.746	-	-	-	1	165.964.980	148.068.028	132.712.826	121.507.429		

RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 3

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Satuan	Target Tahunan		Aksi	Output		Tahun 2023								Tahun 2024								Instansi		
				2023	2024		Satuan	Indikator	Target Penyelesaian				Target Anggaran				Target Penyelesaian				Target Anggaran				Koordinator	Pelaksana	
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1		6	Nilai SAKIP	Angka	70,01	70	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan kinerja	1	-	1	-	165.964.980	148.068.028	132.712.826	119.590.746	1	-	1	-	165.694.980	148.068.028	132.712.826	121.507.429	BAPPEDA	SELURUH UNIT KERJA
							Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	4	-	-	-	80.329.993	-	-	-	4	-	-	-	92.002.771	-	-	-	BAGIAN ORGANISASI SETDA	
							Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja	Laporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja	1	1	1	1	80.329.992	76.878.239	43.536.885	32.618.643	1	1	1	1	92.002.771	105.383.963	51.967.591	36.642.904		
							Pelaksanaan Evaluasi dan Reviu Pelaporan Kinerja	Laporan	Jumlah laporan hasil evaluasi dan reviu pelaporan kinerja	5	-	-	-	5.900.000	-	-	-	1	-	-	-	555.000	-	-	-	ITDA	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	7	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	%	100	100	Penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jenis Layanan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada sistem Digital Perizinan Online	89	89	89	89	203.960.792	407.921.583	611.882.375	815.843.166	89	89	89	89	130.350.705	260.701.410	391.052.115	521.402.820	DPMPSTP	SELURUH UNIT KERJA
							Pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital	Laporan	Jumlah laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1	1	1	1	25.544.489	51.088.979	76.633.468	102.177.957	1	1	1	1	33.802.190	67.604.380	101.406.570	135.208.760		
6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	8	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	%	25	25	Pengajuan Unit Kerja calon ZI menuju WBK	Unit Layanan	Jumlah unit layanan calon ZI menuju WBK	10	-	-	-	5.790.000	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	ITDA	SELURUH UNIT KERJA
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	9	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	Penguatan implementasi MR Unit Kerja	Perangkat Daerah	Jumlah hasil pemetaan resiko dan permasalahan pengawasan	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	ITDA	SELURUH UNIT KERJA
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	%	100	100	Melakukan pemantauan, meneruskan dan masuk ke Perangkat Daerah yang menangani	Laporan	Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI serta monitoring dan evaluasi kebijakan SP4N LAPOR	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	ITDA	SELURUH UNIT KERJA

RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 3

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan		Satuan	Target Tahunan		Aksi	Output		Tahun 2023								Tahun 2024								Instansi				
					2023	2024				Target Penyelesaian				Target Anggaran				Target Penyelesaian				Target Anggaran								
					5	6				8	9	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2			TW 3	TW 4	26
9	Penguatan upaya Pencegahan Korupsi	11	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Angka	79	79	Tindak lanjut rekomendasi KPK SPI tahun sebelumnya	Laporan	Jumlah sosialisasi upaya pencegahan korupsi yang mencakup pihak legislatif, eksekutif, pihak ketiga dan masyarakat umum.	-	-	1	-	-	-	2.220.000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ITDA	ITDA
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	12	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	50	60	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Dokumen	Jumlah kebijakan publik dengan tata kelola yang baik	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	BAGIAN HUKUM SETDA	SELURUH UNIT KERJA	
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	13	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86	88		Dokumen	Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan	-	-	-	6	282.922.787	282.922.787	294.587.785	294.587.785	-	-	-	6	282.922.787	282.922.787	294.587.785	294.587.785	BAGIAN HUKUM SETDA	SELURUH UNIT KERJA			
								Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum	-	1	-	1	69.988.964	69.988.964	74.631.872	74.631.872	-	1	-	1	69.988.964	69.988.964	74.631.872	74.631.872	BAGIAN HUKUM SETDA	SELURUH UNIT KERJA			
12	Pelaksanaan Arsip Digital	14	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	25	60	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah kebijakan Arsip Digital	-	-	-	1	2.880.000	-	21.180.940	2.070.000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DAPD	SELURUH UNIT KERJA		
								Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Arsip digital	3	3	3	3					3	3	3	3									
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	15	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	85	90	Pemenuhan jumlah jenis data sektoral	Jenis	Jumlah jenis data sektoral	240	200	200	200	13.274.000	13.274.000	13.274.000	13.274.000	200	200	200	200	16.317.000	16.317.000	16.317.000	16.319.418	DISKOMINFOS ANTI	SELURUH UNIT KERJA			
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	16	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	80	85	Pengelolaan barang dan jasa	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	3	3	3	3	192.828.250	192.828.250	192.828.250	192.828.250	3	3	3	3	222.255.000	222.255.000	222.255.000	222.255.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA	SELURUH UNIT KERJA			
								Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	3	3	3	3	192.828.250	192.828.250	192.828.250	192.828.250	3	3	3	3	222.255.000	222.255.000	222.255.000	222.255.000					

RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 3

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Satuan	Target Tahunan		Aksi	Output		Tahun 2023								Tahun 2024								Instansi		
				2023	2024		Satuan	Indikator	Target Penyelesaian				Target Anggaran				Target Penyelesaian				Target Anggaran				Koordinator	Pelaksana	
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	Program Pengelolaan keuangan daerah: 1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset yang sesuai ketentuan	3	4	3	4	78.923.916.107	74.961.731.921	64.703.261.592	70.742.717.218	3	4	3	4	50.875.010.671	63.593.763.340	76.312.516.008	63.593.763.340	BPKPD	SELURUH UNIT KERJA	
						2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah 3. Koordinasi dan pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah 4. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 5. Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah  Program pengelolaan barang milik daerah : 1. Pengelolaan barang milik daerah	Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset	1	1	1	1	363.694.835	381.120.019	376.759.520	296.874.531	1	1	1	1	211.700.081	264.625.101	317.550.121	264.625.101			
						18	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	%	100	100	Komunikasi kepada Perangkat Daerah penerima	Dokumen	Hasil tindak lanjut	-	1	-	1	-	16.610.000	-	5.050.000	-	1	-	1	-	-
SASARAN STRATEGIS 2 : BUDAYA BIROKRASI BerAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL																											
1	Penataan Jabatan Fungsional	1	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	%	100	100	Pelaksanaan penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional	Laporan	Jumlah laporan data pengelolaan Jabatan Fungsional	-	-	-	1	-	-	-	33.900.000	-	-	-	1	-	-	-	37.290.000	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA
2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	2	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	%	100	100	Pelaksanaan implementasi Manajemen Talenta	Dokumen	Jumlah Dokumen Assesment pegawai dilingkungan Pemkab. Buleleng	-	-	-	1	-	-	-	200.000.000	-	-	-	1	-	-	-	220.000.000	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA



RENCANA AKSI RB GENERAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 3

No.	Kegiatan Utama	Indikator Utama Kegiatan	Satuan	Target Tahunan		Aksi	Output		Tahun 2023								Tahun 2024								Instansi	
				2023	2024		Satuan	Indikator	Target Penyelesaian				Target Anggaran				Target Penyelesaian				Target Anggaran					
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	3 Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	%	100	100	Pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan kinerja Asn	Laporan	Jumlah laporan capaian implementasi pengelolaan kinerja	-	-	-	1	-	-	-	88.800.000	-	-	-	1	-	-	-	97.680.000	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA
4	Penguatan Sistem Merit	4 Indeks sistem Merit	Angka	325	330	Peningkatan Indeks Sistem Merit	Laporan	Jumlah laporan hasil penilaian sistem merit dari KASN	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	BKPSDM	SELURUH UNIT KERJA
5	Pelaksanaan Core Value ASN	5 Indeks BerAKHLAK	Angka	63	64	Pelaksanaan survey implementasi BerAKHLAK	Laporan	Jumlah laporan survey implementasi BerAKHLAK	-	-	-	1	-	-	-	85.107.304	-	-	-	1	-	-	-	41.141.525	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
		6 Employeer Branding	Angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	7 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	85	85	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Laporan	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	1	-	-	-	90.908.029	-	1	-	1	-	127.108.342	-	45.608.608	-	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA
		8 Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,3	4,3	Pelaksanaan pembinaan pelayanan publik	Laporan	Jumlah laporan pembinaan pelayanan publik	-	-	-	1	-	-	-	85.107.304	-	-	-	1	-	-	-	41.141.525	BAGIAN ORGANISASI SETDA	SELURUH UNIT KERJA

3.2.2 Reformasi Birokrasi Tematik

PENETAPAN TEMA RB TEMATIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023 - 2024

STEP 1

NO.	TEMA	KONDISI EKSISTING TAHUN 2022	SATUAN	TARGET		KESESUAIAN PRIORITAS RPJMD	KEPARAHAN MASALAH	DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	POTENSI YANG DIMILIKI	PERCEPATAN KINERJA	NILAI TOTAL
				2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	6,21	%	5,15	4,9	10	7	10	6	6	39
		62,76	%	6,86	9,86						
		5,34	%	63,75	68,33						
2	PENINGKATAN INVESTASI	34,53	%	70	73	10	7	7	9	7	40
3	DIGITALISASI PEMERINTAHAN	3,03	Angka	3,1	3,2	10	6	10	8	8	42
4	PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)	180.327.083.172	Rupiah	523.431.499.359	514.000.000.000	10	8	9	8	8	43
		4.691	Angka	20.000	25.000						
5	PENGENDALIAN INFLASI	4,63	%	3,5	3,5	10	8	9	8	10	45

PENETAPAN KINERJA RB TEMATIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

STEP 2

NO	IDENTIFIKASI MASALAH (bottleneck)	MENETAPKAN FOKUS INTERPENSI	MENYUSUN KERANGKA LOGIS
1	2	3	4
<b>TEMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>			
1	Masih terdapat keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang belum tersentuh program perlindungan sosial	Peningkatan Program Perlindungan Sosial	Pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan program perlindungan sosial lainnya kepada keluarga yang belum tersentuh program pemerintah
2	Masih banyak keluarga miskin yang tidak memiliki rumah layak huni dan minimnya akses sanitasi layak	Peningkatan Program Infrastruktur Dasar	Meningkatkan cakupan sasaran rehab rumah tidak layak huni dan cakupan rumah tangga dengan sanitasi layak kepada rumah tangga miskin
3	Status pekerjaan kepala rumah tangga dan individu penduduk miskin di Kabupaten Buleleng sebagian besar tidak bekerja/pengangguran, sebagai petani dan pedagang kecil	Peningkatan Program Pemberdayaan masyarakat dan UMKM	Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin/kurang mampu, pemberdayaan masyarakat di desa dan pengembangan UMKM
<b>TEMA PENINGKATAN INVESTASI</b>			
1	Belum tercapainya target realisasi investasi	Meningkatnya wawasan dan pemahaman terhadap perizinan berusaha	Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Resiko
		Meningkatnya pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Melaksanakan pengawasan Perizinan Resiko
		Peningkatan realisasi investasi	Melaksanakan pengawasan Perizinan Resiko

PENETAPAN KINERJA RB TEMATIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

STEP 2

NO	IDENTIFIKASI MASALAH (bottleneck)	MENETAPKAN FOKUS INTERPENSI	MENYUSUN KERANGKA LOGIS
1	2	3	4
<b>TEMA DIGITALISASI PEMERINTAHAN</b>			
1	Masih terdapatnya area blankspot di wilayah	Meningkatkan kinerja jaringan internet/komunikasi	Meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama antar instansi/lembaga/masyarakat
2	Sistem pemerintahan yang digunakan belum sepenuhnya berbasis digital	Melakukan digitalisasi dan integrasi antar sistem pemerintahan	Menyusun sistem pemerintahan berbasis elektronik
3	Belum optimalnya pemanfaatan SDM yang mempunyai kualifikasi TIK	Meningkatkan kualitas SDM dan komunitas masyarakat dalam kemampuan TIK	Menyusun pemetaan SDM dan komunitas masyarakat dalam TIK
<b>TEMA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)</b>			
1	Masih kurangnya penggunaan produk dalam negeri dan produk lokal	Meningkatkan produksi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk lokal	Meningkatkan belanja produk dalam negeri dan produk lokal dalam belanja barang jasa pemerintah dengan memanfaatkan katalog elektronik
2	Belum optimalnya penggunaan anggaran pemerintah dalam belanja produk dalam negeri	Meningkatkan prosentase belanja produk dalam negeri minimal 40% pada belanja barang jasa pemerintah	Melaksanakan monitoring, evaluasi belanja barang jasa pemerintah dalam belanja produk dalam negeri
<b>TEMA PENGENDALIAN INFLASI</b>			
1	Masih terjadinya gejala inflasi	Meningkatkan monitoring, operasi pasar dan Kerjasama Antar Daerah	Melaksanakan monitoring, operasi pasar dan Kerjasama Antar Daerah



RENCANA AKSI RB TEMATIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023-2024

STEP 3

NO	PERMASALAHAN	SASARAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET OUTCOME			AKSI	OUTPUT	INDIKATOR	TAHUN 2023								TAHUN 2024								INSTANSI	
					BASELINE 2022	2023	2024				TARGET OUTPUT				TARGET ANGGARAN				TARGET OUTPUT				TARGET ANGGARAN				KOORDINATOR	PELAKSANA
											TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
TEMA DIGITALISASI PEMERINTAHAN																												
1	Masih terdapatnya area blankspot di wilayah, Sistem pemerintahan yang digunakan belum sepenuhnya berbasis digital dan Belum optimalnya pemanfaatan SDM yang mempunyai kualifikasi TIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SPBE	Nilai /Angka	3,03	3,1	3,2	Meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama antar instansi/ lembaga/ masyarakat	Titik	Jumlah Penuntasan titik-titik yang blankspot	2	2	2	2	44.422.200	44.422.200	44.422.200	44.422.200	2	2	2	2	44.422.200	44.422.200	44.422.200	44.422.200	DISKOMINF OSANTI	PROVIDER
							Menyusun sistem pemerintahan berbasis elektronik	Aplikasi	Jumlah sistem informasi di SKPD yang terintegrasi	2	2	2	2	203.828.458	54.028.587	54.028.587	54.028.587	2	2	2	2	67.121.035	67.121.035	67.121.035	67.121.035		SELURUH UNIT KERJA	
							Menyusun pemetaan SDM dan komunitas masyarakat dalam TIK	Orang	Jumlah SDM dan komunitas masyarakat dalam TIK	189	189	189	189	34.078.251	6.358.347	6.358.347	6.358.338	189	189	189	189	6.608.303	6.608.303	6.608.303	6.608.303		SELURUH UNIT KERJA/ DESA/ KELURAHAN	
TEMA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)																												
1	Penyelesaian penutupan kontrak pada e-purchasing dan non e-purchasing belum semua dapat diselesaikan oleh PA/KPA Perangkat Daerah sehingga target tahun depan agar PA/KPA dapat segera menginput secara maksimal	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	Nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri minimal 40% dari anggaran belanja pengadaan APBD	Rupiah	415.213.177.923	523.431.499.359	544.000.000.000	Memperingatkan PA/ KPA Perangkat Daerah melalui surat Sekda untuk menyelesaikan permasalahan	Laporan	Jumlah laporan rekomendasi pengadaan barang dan jasa dengan nilai PDN kurang dari 40%	5	15	15	5	192.828.250	192.828.250	192.828.250	192.828.250	10	20	20	10	222.255.000	222.255.000	222.255.000	222.255.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA	SELURUH UNIT KERJA
			Nilai produk lokal UMKM dan Koperasi pada e-katalog lokal	Angka	1.000	20.000	25.000	Target penginputan paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Desember 2023	Laporan	Jumlah laporan katalog lokal kepada penyedia UMKM /Koperasi	-	1	-	1					-	1	-	1						
									Laporan	Jumlah produk tayang pada katalog lokal daerah	3	3	3	3					3	3	3	3						

RENCANA AKSI RB TEMATIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023-2024

STEP 3

NO	PERMASALAHAN	SASARAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET OUTCOME			AKSI	OUTPUT	INDIKATOR	TAHUN 2023								TAHUN 2024								INSTANSI	
					BASELINE 2022	2023	2024				TARGET OUTPUT				TARGET ANGGARAN				TARGET OUTPUT				TARGET ANGGARAN				KOORDINATOR	PELAKSANA
											TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
TEMA PENGENDALIAN INFLASI																												
1	Tingginya harga kebutuhan pokok pada saat hari besar keagamaan dan saat off session	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	Laju Inflasi	%	4,63	3,5	3,5	Melakukan operasi pasar, monitoring harga dan kerjasama antar daerah	Laporan	Jumlah Operasi Pasar	12	12	12	12	747.097.667	747.097.667	747.097.667	747.097.667	12	12	12	12	822.800.000	822.800.000	822.800.000	822.800.000	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN BULELENG	BUMD
2	Rendahnya harga hasil pangan pada saat panen raya						Melaksanakan kerjasama antar daerah dan menegaskan Perumda untuk membeli hasil panen	Laporan	Jumlah Monitoring dan evaluasi ketersediaan bahan pangan pokok	4	4	4	4	37.843.750	37.843.750	37.843.750	37.843.750	4	4	4	4	41.628.125	41.628.125	41.628.125	41.628.125	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN BULELENG	DISPERINDAGKOP UKM DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

## BAB IV

### MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

#### Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik dilakukan secara berkala.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang komprehensif menjadi penting. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP) sesuai pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



## BAB V

### PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mengingat Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan Road Map Reformasi Birokrasi dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategi Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA